DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

ALTYA TIARAHATI

NIM. B1011211044

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Altya Tiarahati
NIM	:	B1011211044
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	:	Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 09 Juli 2025



Altya Tiarahati
NIM. B1011211044

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Altya Tiarhati
NIM	:	B1011211044
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 09 Juli 2025



Altya Tiarahati
NIM. B1011211044

LEMBAR YURIDIS

Determinan Indeks Pembangunan Manusia di

Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Altya Tiarahati
B1011211044

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.	07/07/2025	
		NIP 196205251987031002		
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si.	07/07/2025	
		NIP 196203091987032007		
3.	Anggota Penguji	Supriaman, S.Pd., M.Si.	03/07/2025	
		NIP 199104132023211000		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 11 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	:	Altya Tiarahati
NIM	:	B1011211044
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP. 196205251987031002	28/05/2015	

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah "**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, membimbing, mendukung, dan memberikan saran, masukan, serta doa. Dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Supriaman, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji kedua yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses admnistrasi demi kelancaran tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Awaludin dan Ibu Yeti Martina pertama penulis sekaligus panutan penulis yang menjadi satu diantara alasan penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini. Kepada beliau berdualah tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati dipersembahkan sepenuhnya sebagai bukti nyata dari buah perjuangan panjang, doa yang tak pernah putus, dan cinta yang tidak pernah surut,

keberhasilan perjuangan beliau berdua yang mampu melahirkan sarjana pertama di keluarga. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan yang diberikan untuk kehidupan penulis, walaupun beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus dan tidak pernah lelah dalam mendoakan, memberikan semangat, motivasi, materi kepada penulis sehingga tidak pernah sekalipun penulis merasakan. kekurangan dalam hal apapun dan berkat dorongan beliau berdua penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan tugas akhir ini tepat waktu.

10. Saudara kandung penulis satu satunya, Annisa Khaira Mufida yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju. Dalam diri penulis, tumbuh keyakinan bahwa mimpi seorang kakak bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi batas tertinggi harapan bagi adiknya. Semangat dan harapan menjadi penguat tersendiri bagi penulis untuk terus mengejar dan menggapai impian, setinggi dan sebaik mungkin. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
11. Bunda Rohati, saudara kandung dari bapak penulis, dan suaminya Pakde Slamet Waluyo, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Sosok Bunda telah hadir layaknya ibu kedua, yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Di setiap langkah perjuangan, Bunda dan Pakde selalu hadir dengan ketulusan yang menguatkan. Terima kasih atas doa, nasihat, semangat, serta kebaikan yang tidak pernah putus.
12. Kepada Nenek tercinta. Doa kalian yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan nasihat sederhana yang penuh makna selalu menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian adalah berkah yang tak ternilai.
13. Kepada Paman Yoga Julian Pramana adik dari ibu penulis, serta istri beliau, Kemuning Damayanti, atas segala bentuk perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama perjalanan penulis menyelesaikan pendidikan ini. Kebaikan hati, doa yang tulus, serta semangat yang tak henti-hentinya menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis.
14. Sepupu penulis, Fadhila Nugrahati Waluyo, Rian Aditya, Fauziya Mutiarahati Waluyo, Utin Ria Aisya Rosady,Taufik Alhakim yang memberi energi positif dan menghibur penulis.
15. Sahabat sejati sejak kecil, Eti yang telah tumbuh dan berjalan bersama penulis dalam setiap fase kehidupan dari tawa polos masa kecil hingga perjuangan menuju cita-cita hari ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, tempat bersandar saat lelah, dan sumber semangat. Dukungan beliau baik dalam diam maupun dalam tawa, telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Sahabat SMP yaitu Yessi, Nurmala, Lia, Icha, Nia yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini sejak masa remaja. Terima kasih atas kenangan indah, canda tawa, dan dukungan yang terus terjalin hingga saat ini. Kehadiran kalian selalu memberi semangat dan warna tersendiri dalam hidup penulis.
17. Sahabat SMA yaitu Aslahul Nursafitri, Maisan Maula, Yuliana. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan sejak masa sekolah hingga hari ini penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

18. Kepada Setia Lestari teman seperjuangan yang telah menemani langkah demi langkah penulis selama masa dibangku perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai hingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
19. Terima Kasih kepada Utin Diana Permatasari, Safitri Lidyana atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Kehadiran dan semangat kalian sangat berarti bagi penulis.
20. Terima kasih kepada rekan-rekan bidang Eksternal HIMEPA FEB UNTAN angkatan 2021 yaitu Shelly, Lili, Berlin, Ferdi, Gusti yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan di perantauan. Atas segala bentuk perhatian dan kerja sama yang telah terjalin, serta atas peran rekan-rekan yang telah menjadi tempat berbagi, menguatkan dalam kesulitan, dan mendukung setiap langkah penulis dalam meraih impian. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dan berkesan dalam perjalanan penulis.
21. Seluruh keluarga besar HIMEPA FEB UNTAN. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk berkembang, mendapatkan pengalaman berharga dan terima kasih terkhusus untuk pengurus HIMEPA angkatan 2021 karena sudah menjadi bagian menyenangkan selama perkuliahan penulis. Penulis bangga pernah menjadi bagian HIMEPA.
22. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Terima kasih telah bersama-sama berjuang hingga saat ini. Selamat berjuang di jalan masing-masing.
23. Kepada sang penulis karya tulis ini, Altya Tiarahati seorang anak pertama yang beranjak menuju usia 22 tahun. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, ada banyak momen penuh kelelahan, keraguan, dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, penulis memilih untuk bertahan belajar bersabar, percaya pada proses, dan yang paling penting percaya pada kemampuan diri sendiri. Tugas Akhir ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati berbagai rintangan, meskipun tidak jarang terasa berat. Karya ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, sebagai pengingat bahwa penulis telah berjuang, telah kuat, dan layak untuk bangga atas pencapaian yang telah diraih. Semoga perjalanan ini tidak hanya menjadi catatan pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi diri penulis dan orang lain di masa depan bagi siapa pun yang tengah berjuang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga menjadi tugas akhir yang baik.

Pontianak, 16 Juni 2025



Altya Tiarahati

NIM. B1011211044

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta penerimaan daerah terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan yaitu data panel dihitung berdasarkan 14 Kabupaten dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan bantuan alat statistik *Eviews* 12. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: IPM, Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Pengangguran, Belanja Pemerintah, Penerimaan Daerah.

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Altya Tiarahati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses terhadap perubahan berjalannya secara terus menerus sehingga tercapainya kehidupan yang lebih memadai kedepannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat komprehensif yang sudah dirancang oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dalam mengukur perkembangan sosial maupun ekonomi dari berbagai negara di dunia serta melihat sebuah tingkat pencapaian tujuan dalam menuju pembangunan yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat diberbagai wilayah. Maka, dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat memperlihatkan adanya sebuah gambaran mengenai proses dalam pelaksanaan terhadap apa yang sudah dibangun untuk masyarakat. Adapun didalam prosesnya yang menjadi tolak ukur dengan memperhatikan standar kehidupan untuk manusia yaitu dapat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tingkat kemiskinan, jumlah penganguran, pengeluaran pemerintah serta penerimaan pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah akan menjadi penyelenggara pembangunan pastinya memerlukan adanya berkualitasnya modal manusia untuk pokok pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia maka akan diperlukan berbagai aspek dan dimensi pembangunan manusia, perbandingan pencapaian dan perkembangan pembangunan manusia antar wilayah sepanjang periode. Salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami dinamika pembangunan manusia yaitu *human capital theory*. *Teori Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker, menyatakan bahwa manusia berbentuk modal bukan hanya sebagai sekedar sumber daya. Modal manusia sangat berperan penting untuk melihat dari berbagai aspek yaitu aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan dan melalui kebiasaan yang baik untuk mencapai produktivitas.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat selalu meningkat dalam 4 tahun terakhir, artinya pembangunan manusia juga selalu meningkat, tetapi masih terdapat masalah perekonomian seperti jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran yang selalu berfluktuasi. Selain itu, belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal, dilihat dari ketidakstabilan realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Ketidakstabilan alokasi belanja daerah dapat menyebabkan ketidakpastian untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan pada akhirnya akan

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Daerah terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dan pendekatan data panel untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belaja pemerintah bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang kesehatan dan penerimaan daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Barat. Data sekunder diperoleh dari jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran dan untuk laporan keuangan realisasi dari belanja pemerintah bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang kesehatan dan penerimaan daerah. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi *EViews* 12 untuk analisis regresi. Model terbaik ditentukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas) serta uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien -0.022197 (<0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin akan menurunkan tingkat pembangunan manusia. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, maka semakin rendah akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak tiga komponen utama dalam pengukuran IPM. Sementara itu, jumlah pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dengan koefisien 0.156029 (>0,05), yang berarti bahwa peningkatan jumlah pengangguran justru berkorelasi dengan peningkatan IPM. Kondisi ini mungkin terjadi karena sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok berpendidikan, yang meskipun tidak bekerja, tetap memiliki kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang baik. Selanjutnya belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ipm dengan koefisien -0.039234 yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan justru berkorelasi dengan penurunan IPM. Belanja pemerintah bidang kesehatan dengan koefisien

0.171345 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ipm yang berarti peningkatan anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Untuk penerimaan daerah dengan koefisien 0.178847 yang dimana juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ipm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian secara simultan, kelima variabel ini berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai F-statistic 245,0787 dan signifikansi 0,0000 (<0,05). Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,86% menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang kesehatan dan penerimaan daerah mampu menjelaskan indeks pembangunan manusia secara signifikan. Oleh karena itu variabel-variabel tersebut yang dimana bisa dalam menentukan tingkat pembangunan manusia di daerah yang diteliti. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan dan program yang tepat sasaran pada bidang-bidang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, semakin rendah capaian pembangunan manusia. Jumlah Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Fenomena ini terjadi karena mayoritas pengangguran di Kalimantan Barat merupakan pengangguran terdidik, yaitu lulusan pendidikan menengah atau tinggi yang belum terserap oleh pasar kerja. Belanja Pemerintah di bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang besar belum diikuti dengan efektivitas dalam pelaksanaannya. Belanja Pemerintah di bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi anggaran yang tepat di sektor kesehatan terbukti mampu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, Penerimaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Semakin tinggi pendapatan asli daerah atau dana transfer yang diterima, semakin besar kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program-program strategis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, disarankan pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan peluang kerja dan usaha baru. Untuk alokasi anggaran pendidikan harus menyasar peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Peningkatan anggaran kesehatan perlu dibarengi dengan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia, Pemerintah daerah harus menggunakan pendapatan secara efektif untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **ii**
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ..... **iii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
RINGKASAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

1. PENDAHULUAN **2**
2. KAJIAN LITERATUR **12**
2.1. Tinjauan Teori 12
2.1.1. Teori Human Capital 12
2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia 12
2.1.3. Kemiskinan 13
2.1.4. Pengangguran 13
2.1.5. Belanja Pemerintah 14
2.1.6. Belanja Pendidikan 14
2.1.7. Belanja Kesehatan 15
2.1.8. Penerimaan Daerah 15
2.2. Kajian Empiris 16
2.2.1. Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.2. Jumlah Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.3. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.4. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.5. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 17
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 17
3. METODE PENELITIAN **18**
3.1. Bentuk dan Jenis Penelitian 18
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 18
3.3. Metode dan Analisis Data 19
3.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 19
3.3.2. Uji Spesifikasi Model 20
3.3.3. Uji Asumsi Klasik 21
3.3.4. Uji Statistik 22
4. HASIL DAN PEMBAHASAN **22**

4.1. Hasil Penelitian 22
4.1.1. Pemilihan model Regresi Data Panel 22
4.1.2. Analisis Regresi Linear Berganda 23
4.1.3. Asumsi Klasik 24
4.1.4. Uji Statistik 25
4.2. Pembahasan Penelitian 27
4.2.1. Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 27
4.2.2. Jumlah Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 28
4.2.3. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 30
4.2.4. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 31
4.2.5. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 32
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 33
5.1 Simpulan 33
5.2 Rekomendasi 34

DAFTAR RUJUKAN 34
LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 3

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)..... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa)..... 6

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023. 8

Tabel 1.5 Realisasi belanja Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023. 9

Tabel 1.6 Realisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah) 10

Tabel 3.1 Definisi Operasional variabel 18

Tabel 4.1 Hasil Uji Model Regresi 22

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda 23

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 24

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas..... 25

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 25

Tabel 4.6 Uji Signifikan t 26

Tabel 4.7 Uji F- Statistik..... 27

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R2) 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) 41
Lampiran 2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa) 42
Lampiran 3. Jumlah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa) 43
Lampiran 4. Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah) 44
Lampiran 5. Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah) 45
Lampiran 6. Realisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah) 46
Lampiran 2. Hasil Uji Data 47

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Altya Tiarahati
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to test and analyze the effect of the number of poor people, the number of unemployed, government spending on education and health, and regional revenues on the HDI in West Kalimantan Province. This study is descriptive quantitative, using secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The data used is panel data calculated based on 14 districts from the last 5 years, namely 2019-2023. The method used is panel data regression with the help of the Eviews 12 statistical tool. The results of the study show that the number of poor people has a negative and significant effect on the HDI, the number of unemployed has a positive and significant effect on the HDI, government spending on education has a negative and significant effect, government spending on health has a positive and significant effect on the HDI, and regional revenue has a positive and significant effect on the HDI in West Kalimantan Province.

Keywords: *Human Development Index, Number of Poor People, Number of Unemployed, Government Spending, Regional Revenue.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta penerimaan daerah terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan yaitu data panel dihitung berdasarkan 14 Kabupaten dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan bantuan alat statistik *Eviews* 12. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dan penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: IPM, Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Pengangguran, Belanja Pemerintah, Penerimaan Daerah.

[1] b1011211044 @student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses terhadap perubahan berjalannya secara terus menerus sehingga tercapainya kehidupan yang lebih memadai kedepannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat komprehensif yang sudah dirancang oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dalam mengukur perkembangan sosial maupun ekonomi dari berbagai negara di dunia serta melihat sebuah tingkat pencapaian tujuan dalam menuju pembangunan yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat diberbagai wilayah. Maka, dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat memperlihatkan adanya sebuah gambaran mengenai proses dalam pelaksanaan terhadap apa yang sudah dibangun untuk masyarakat Yoga (2024). Adapun didalam prosesnya yang menjadi tolak ukur dengan memperhatikan standar kehidupan untuk manusia yaitu dapat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tingkat kemiskinan, jumlah penganguran, pengeluaran pemerintah serta penerimaan pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah akan menjadi penyelenggara pembangunan pastinya memerlukan adanya berkualitasnya modal manusia untuk pokok pembangunan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia maka akan diperlukan berbagai aspek dan dimensi pembangunan manusia, perbandingan pencapaian dan perkembangan pembangunan manusia antar wilayah sepanjang periode. Salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami dinamika pembangunan manusia yaitu *human capital theory*. *Teori Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker, menyatakan bahwa manusia berbentuk modal bukan hanya sebagai sekedar sumber daya. Modal manusia sangat berperan penting untuk melihat dari berbagai aspek yaitu aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan dan melalui kebiasaan yang baik untuk mencapai produktivitas.

Adapun beberapa hal yang disebutkan sebagai modal manusia yang tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, pembangunan manusia akan di dukung melalui pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa proses untuk pembangunan manusia menjadi sebuah proses dalam memberi keluasan manusia dalam memilih sehingga dapat meningkatkan peluang dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan yang bermutu, penghasilan dan pekerjaan serta dapat menempatkan porsinya sebagai sumber kekayaan suatu bangsa bisa dilihat dari pencapaian suatu pertumbuhan manusia Ashshiddiqi *et al.,* (2021). Adapun manusia dapat berfungsi sebagai subjek dan objek dalam suatu pembangunan manusia mini akan menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan fakta bahwa ketersediaan sumber daya manusia menjadi kualitas dalam suatu kerbehasilan pembangunan. Namun, dalam mencapai pembangunan akan memerlukan suatu indikator untuk merepresentasikan berbagai aspek dan dimensi pembangunan manusia, menganalisis perbandingan dalam tercapainya pembangunan manusia antar wilayah serta perkembangannya sepanjang waktu. Adapun juga selama periode 2019 hingga 2023, Indonesia mengalami peningkatan IPM rata-ratanya sebesar 0,84%. Demikian, selama periode 2019-2023, IPM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik menunjukkan IPM yang ada Kalimantan Barat

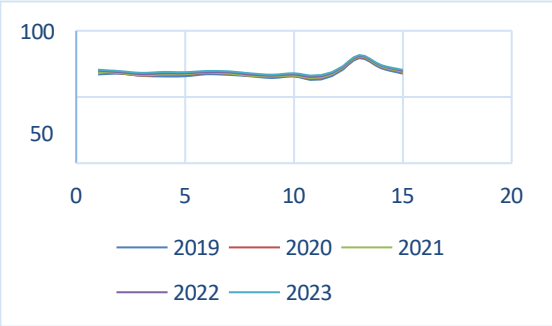
mengalami peningkatan dari 68,76 di tahun 2019 lalu menjadi 70,47 di tahun 2023. Demikian, hal ini menunjukkan dalam 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia sudah mengalami peningkatan. Dalam regional Kalimantan, kini Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengalami perubahan status termasuk menjadi IPM kategori tinggi. Provinsi Kalimantan Barat yang dimana sebelumnya merupakan provinsi dengan nilai IPM yang paling rendah, dan sudah terbilang akan kalah bersaing dengan Provinsi Kalimantan Timur (78,20), Kalimantan Selatan (72,50), Kalimantan Tengah (72,20), bahkan kalah dari Kalimantan Utara (72,49) dimana merupakan salah satu provinsi baru yang resmi aktif pada tahun 2012.

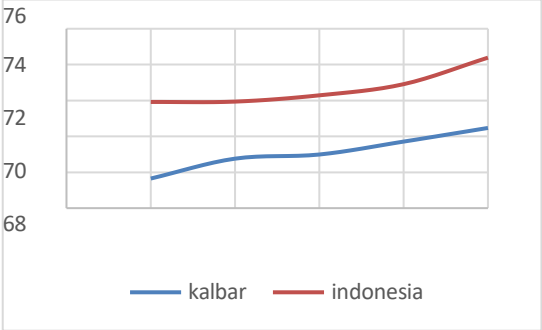
Secara nasional, rendahnya angka IPM Kalimantan Barat menyebabkan Kalimantan Barat menduduki peringkat 30 dan tidak berubah dari tahun sebelumnya. Kalimantan Barat tersebut merupakan salah satu sebuah provinsi yang terletak di Indonesia berada di pulau Kalimantan, Kalimantan barat memang telah mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jika dilihat dari 14 Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. IPM Kalimantan Barat juga mengalami tren peningkatan yang cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Berikut adalah perkembangan IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	67,02	68,97	69,03	69,88	70,60
Bengkayang	67,57	67,87	68,04	68,74	69,53
Landak	65,96	66,10	66,33	67,28	68,22
Mempawah	65,50	66,71	67,00	67,91	68,91
Sanggau	65,67	66,73	67,18	67,87	68,73
Ketapang	67,16	68,13	68,39	68,86	69,61
Sintang	66,70	67,61	67,66	68,59	69,39
Kapuas Hulu	65,65	65,92	65,98	66,91	67,86
Sekadau	64,34	65,33	65,48	66,13	66,83
Melawi	65,54	65,74	66,06	66,99	67,92
Kayong Utara	62,66	63,97	64,18	65,09	66,06
Kubu Raya	67,76	68,89	69,09	69,83	70,50
Kota Pontianak	79,35	80,10	80,59	81,10	81,63
Kota Singkawang	71,72	72,73	72,90	73,66	74,13
Kalimantan Barat	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2023)





Tabel 1.1. menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam pembangunan manusia dengan angka yang cukup signifikan. Dan IPM untuk Provinsi Kalimantan Barat dari 2019-2023 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan ini akan terjadi secara perlahan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan data di atas menunjukkan adanya hal positif bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Jika terlihat dari perkembangan IPM dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat perkembangan yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 79,35 dicapai oleh Kota Pontianak. Sedangkan perkembangan IPM yang terendah 2019 yaitu sebesar 62,66 dicapai oleh Kabupaten Kayong Utara. Sementara untuk perkembangan IPM yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,63 dicapai oleh Kota Pontianak dan untuk IPM terendah tahun 2023 sebesar 66,06 terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Adapun juga kenaikan IPM merupakan hasil kerjasama suatu masyarakat dalam mewujudkan percepatan terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian, jika dibandingkan IPM Kalimantan Barat dan Indonesia tahun 2019–2023 dapat dibandingkan IPM Kalimantan Barat selalu berada di bawah IPM nasional namun keduanya menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Kalimantan Barat naik dari 67,65 (2019) menjadi 70,47 (2023), sementara Indonesia naik dari 71,92 menjadi 74,39 di periode yang sama. Meskipun Kalbar meningkat lebih cepat, selisih sekitar 4 poin masih tetap ada, menunjukkan Kalbar masih tertinggal dibanding rata-rata nasional.

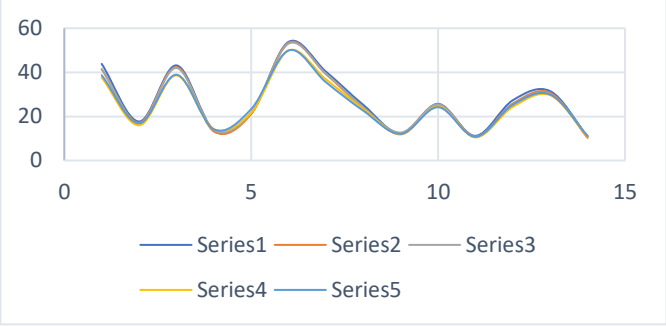
Kemudian, untuk mencapai target IPM yang diinginkan terdapat adanya beberapa faktor mempengaruhi yaitu seperti faktor ekonomi makro maupun dari faktor lainnya Zakaria, (2016). Adanya peningkatan secara terus menerus dalam IPM menandakan bahwa ada perubahan yang baik dari kualitas dalam pembangunan yang terjadi oleh manusia di Provinsi Kalimantan Barat dan dapat dilihat dari dimensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Munculnya kemiskinan yang ada kaitannya terhadap budaya yang ada dimasyarakat, serta ketidakadilan dalam kepemilikan dari faktor produksi maupun terhadap pendekatan pembangunan dalam penggunaan model yang sudah dianut oleh suatu negara. Bahkan melihat dari orang yang bertahan hidup yang masih dibawah garis kemiskinan maka masih dianggap miskin. Dan hal ini dapat menyebabkan terjebak dalam lingkaran setan, pendapatan menurun akan menyebabkan penurunan permintaan dan investasi kemudian akhirnya terjadi produktivitas yang menurun. Akan tetapi penurunan produktivitas ini akan menyebabkan kesulitan untuk orang-orang dalam mengakses

pendidikan. Demikian, adapun juga untuk Jumlah Penduduk Miskin yang berada di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	43,84	41,41	41,49	37,65	38,71
Bengkayang	17,69	17,11	16,92	15,97	16,87
Landak	43,16	42,36	42,01	38,65	38,92
Mempawah	14,02	13,18	13,82	14,30	14,15
Sanggau	21,41	21,16	21,70	21,74	23,34
Ketapang	53,84	53,45	53,04	49,92	49,95
Sintang	40,30	39,19	39,40	36,76	35,49
Kapuas Hulu	25,22	23,93	24,03	23,43	22,59
Sekadau	12,28	11,92	12,69	11,91	12,09
Melawi	25,71	25,34	25,47	24,57	24,18
Kayong Utara	11,21	10,90	10,72	10,52	10,77
Kubu Raya	27,37	25,90	25,47	24,39	25,33
Kota Pontianak	31,46	30,70	30,11	29,61	29,92
Kota Singkawang	10,90	10,23	11,03	10,82	11,06
Kalimantan Barat	378,41	366,77	367,89	350,25	353,35

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2024)



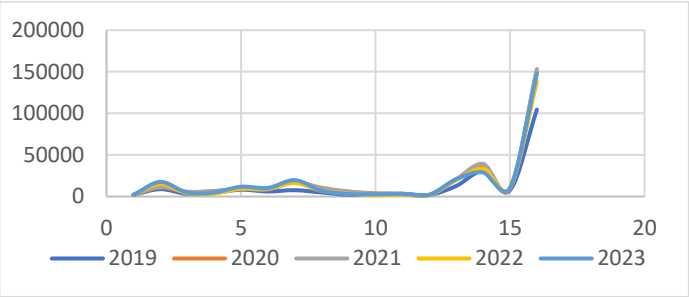
Tabel 1.2. memberikan gambaran dalam perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat tampak berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan menurun walaupun tidak signifikan. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Ketapang sebesar 53,84 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah tahun 2019 terlihat pada Kota Singkawang sebesar 10,90 ribu jiwa. Sementara pada tahun 2023 terkait dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu di Kabupaten Ketapang

sebesar 49,95 ribu jiwa dan untuk jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2023 terletak pada kabupaten Kayong Utara sebesar 10,77 ribu jiwa. Dalam hal ini, IPM akan mendapat pengaruh akan jumlah penduduk miskin, apabila jumlah penduduk miskinnya meningkat maka tingkat produktivitasnya akan surut, sehingga angka IPM juga ikut menurun. Kemiskinan disuatu wilayah dapat diatasi melalui peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera, pembangunan yang merata secara optimal, lapangan kerja yang diperluas. Karena kemiskinan di Kalimantan Barat ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan ekonomi dan salah satunya adalah jumlah pengangguran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terjadinya tidak seimbang antara meningkatnya angkatan kerja dan lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak orang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran memiliki hubungan erat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan menilai kualitas hidup masyarakat. Ketika tingkat pengangguran meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga berdampak negatif pada perekonomian. Oleh sebab itu, perlu dalam menganalisis tren dalam pengangguran secara rinci menggunakan data statistik agar dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat. Berikut adalah data jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 -2023.

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	8.873	10.879	11.534	15.143	17.592
Bengkayang	3.163	5.513	5.858	3.831	4.721
Landak	4.477	6.733	6.387	3.673	4.878
Mempawah	8.261	9.478	9.302	9.499	11.813
Sanggau	6.024	8.840	8.665	9.707	10.372
Ketapang	7.685	17.044	17.523	16.217	19.678
Sintang	4.870	10.512	9.625	6.899	7.025
Kapuas Hulu	2.223	5.901	6.128	3.535	3.110
Sekadau	3.048	3.950	3.179	1.513	2.785
Melawi	3.401	3.118	3.056	2.339	3.320
Kayong Utara	1.993	2.019	2.084	1.860	2.186
Kubu Raya	12.698	20.758	20.633	19.643	20.937
Kota Pontianak	30.272	37.405	39.251	33.452	28.940
Kota Singkawang	7.530	9.411	10.082	10.369	10.217
Kalimantan Barat	104.518	151.561	153.307	137.680	147.574

Sumber: BPS Kalimantan Barat (2023)



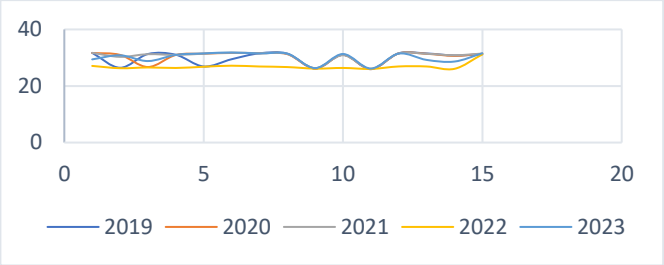
Tabel 1.3. menunjukkan adanya dari jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat bersifat fluktuatif. Jika terlihat dari tahun 2019 jumlah pengangguran tertinggi sebanyak 30.272 jiwa terdapat di Kota Pontianak, untuk jumlah pengangguran terendah sebanyak 1.993 jiwa terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Sementara tahun 2023 untuk jumlah pengangguran tertinggi sebanyak 28.940 jiwa di Kota Pontianak. Sedangkan jumlah pengangguran yang terendah sebanyak 2.186 jiwa terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Selama lima tahun terakhir angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat selalu meningkat. Dalam masalah pengangguran selalu erat kaitannya dengan isu megenai kependudukan. Jumlah pengangguran terus meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lajunya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat. Namun, meskipun pemerintah telah memberikan dari berbagai program unggulan dalam upaya menurunkan angka pengangguran, tetapi hasilnya tetap berbanding terbalik. Pengangguran mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, kemakmuran dan kesejahteraan. Penurunan tingkatkesejahteraan akan berdampak terhadap ketidakmampuan masyarakat untuk menenuhi kebutuhan standar hidup dan tidak mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia karena memerlukan biaya yang cukup tinggi L. S. Hasibuan *et al.,* (2020).

Zakaria (2016) mengatakan bahwa pembangunan manusia tidak lepas dari intervensi pemerintah dan manusia menjadi modal utama untuk membangun suatu daerah. Pemerintah dapat membelanjakan uang atau investasi pembangunan manusia untuk bidang pendidikan maupun kesehatan yang dinilai penting dalam memperbaiki modal manusia. Dua faktor tersebut menjadi modal utama bagi manusia untuk meningkatkan kualitasnya, maka dari itu manusia dapat meningkatkan produktivitasnya. Alokasi anggaran belanja untuk suatu bidang mencerminkan bahwa pemerintah berkomitmen terhadap adanya masalah dalam bidang tersebut. Dengan demikian, pengangguran dan pendidikan memiliki hubungan erat, di mana rendahnya akses dan kualitas pendidikan dapat menyebabkan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Dengan belanja pemerintah pada sektor pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Adapun jumlah realisasi belanja pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	588.015.064.051,48	573.394.958.807,36	592.345.141.690,36	588.682.577.298	593.352.212.567,50
Bengkayang	305.465.261.622,00	287.856.549.812,59	144.820.924.726,84	260.469.267.388	250.445.230.390,75
Landak	395.091.726.161,07	397.244.634.978,00	370.533.768.695,95	340.594.967.142	325.723.524.977,20
Mempawah	305.259.803.042,19	279.589.065.102,58	283.012.070.654,59	284.094.554.975	290.374.658.776,42
Sanggau	482.851.901.500,00	439.461.394.588,92	451.030.852.164,13	437.934.959.159	490.856.775.338,25
Ketapang	619.121.123.774,70	576.125.543.890,74	631.868.675.024,53	630.720.307.079	675.744.890.227,78
Sintang	500.456.107.399,69	520.420.041.515,15	516.200.149.381,43	479.365.634.078	475.290.674.486.63
Kapuas Hulu	450.880.972.976,97	378.414.662.129,28	399.899.394.625,71	393.149.770.632	452.837.770.569,13
Sekadau	231.294.260.582,00	226.230.094.076,00	262.850.471.095,00	227.605.023.542	270.645.310.362,00
Melawi	292.408.237.432,12	286.967.812.376,29	258.124.335.613,72	285.782.856.204	398.763.219.520,15
Kayong Utara	188.682.115.748,00	187.296.692.737,00	209.192.490.569,00	204.041.313.292	230.445.152.750,00
Kubu Raya	514.544.315.317,25	485.018.650.321,16	490.558.043.066,67	483.999.832.478	456.930.874.558,23
Kota Pontianak	477.405.237.630,72	422.964.962.735,67	427.864.249.159,38	480.756.851.201	490.739.834.557,80
Kota Singkawang	233.325.576.582,46	207.728.492.993,13	255.355.325.751,48	209.461.705.007	275.390.456.798,50
Kalimantan Barat	2.098.322.540.963	2.128.016.088.249,00	2.142.666.113.345,00	1.611.066.893.860,00	2.321.819.181.476,00

Sumber : Kementrian Keuangan (2024)



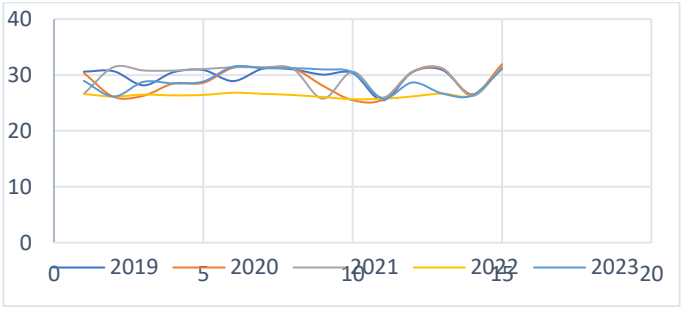
Tabel 1.4. menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan mengalami adanya ketidakstabilan menuju tahun ke tahun di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pada tahun 2019, realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang sebanyak Rp.619.121.123.774,70 dan untuk realisasi belanja pemerintah bidang Pendidikan yang terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak Rp.188.682.115.748,00. Sementara pada tahun 2023 realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan tertinggi masih terdapat di Kabupaten Ketapang sebanyak Rp. 675.744.890.227,78. Sedangkan realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan yang terendah sebanyak Rp. 230.445.152.750,00 masih terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian, selain belanja pemerintah di bidang pendidikan, penting juga melihat belanja pemerintah di bidang kesehatan, karena keduanya saling berkaitan dalam memberi peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, belanja pemerintah di kedua sektor ini harus seimbang

agar dapat meningkatkan IPM. Berikut data realisasi belanja pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023.

Tabel 1.5 Realisasi belanja Pemerintah Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	194.004.325.798.25	157.285.228.482,94	370.465.190.002,00	355.894.055.914	376.775.210.476,30
Bengkayang	200.094.839.321.92	212.867.257.633,00	442.246.666.360.85	226.998.668.463	226.998.668.463
Landak	168.916.931.143,80	260.962.872.496,00	241.462.709.310,82	322.327.697.135	315.346.867.770.50
Mempawah	178.016.169.271.18	234.995.153.712.90	234.996.465.470.18	280.478.587.625	238.910.553.679,20
Sanggau	261.199.370.288,37	264.996.837.581,70	309.680.189.766.24	301.634.011.112	335.442.721.658.40
Ketapang	360.542.758.505,80	401.519.284.400,43	424.664.992.522,56	446.779.315.581	480.567.945.341,87
Sintang	334.987.588.804,36	411.387.026.968.47	414.114.560.240.32	370.439.101.493	356.289.555.737.42
Kapuas Hulu	289.889 101.097,01	355.306.182.569.01	324.758.748.994,63	299.664.589.428	360.579.346.425,05
Sekadau	115.159.061 300.59	157.487.610.540,30	155.419.988.895,00	206.954.691.350	290.453.981.746,23
Melawi	150.085.515.888,52	118.282.765.033,00	192.302.622.513.72	141.916.091.324	174.514.274.763.56
Kayong Utara	115.070.130.011,00	128.663.420.892,00	187.323.537.182,00	151.452.701.226	155.340.567.854.00
Kubu Raya	180.961.127.274,47	181.990.399.806.08	200.164.177.493.91	232.881.403.849	280.336.576.873.50
Kota Pontianak	266.274.951.567,48	325.279.572.965,23	359.690.133.761.55	388.599.094.086	390.985.452.76,60
Kota Singkawang	336.906.119.224,00	331.995.130.579.00	251.478.268.926,00	280.895.649.294	272.655.891.743,00
Kalimantan Barat	2.446.382.124.494,00	512.293.463.193,00	2.568.312.261.536,00	791.756.667.095,00	857.484.610.465,00

Sumber : Kementrian Keuangan (2024)



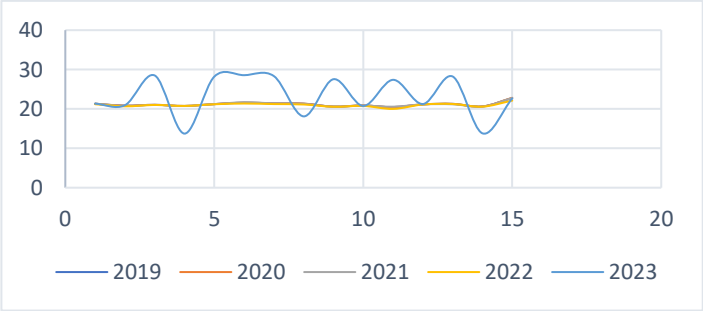
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari realisasi belanja pemerintah bidang kesehatan pada tahun 2019 yang tertinggi sebanyak Rp. 360.542.758.505,80 di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya realisasi belanja pemerintah bidang kesehatan yang terendah sebanyak Rp.115.070.130.011,00 terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan melihat dari tahun 2023 yang dimana Kabupaten Ketapang masih memiliki realisasi belanja pemerintah tertinggi di bidang kesehatan sebanyak Rp. 480.567.945.341,87. Sedangkan realisasi belanja pemerintah bidang kesehatan yang terendah masih terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak Rp. 155.340.567.854,00. Adapun hal tersebut melihat dari kedua Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara ini sangat jauh sekali perbedaan dari tahun ke tahunnya yang dimana

ada beberapa alasan dilihat melalui IPM di atas beserta jumlah penduduk yang di Kabupaten Ketapang meningkat, sementara untuk Kabupaten Kayong Utara yang dimana IPM dan jumlah penduduknya cukup rendah maka realisasi belanja pemerintah juga akan dikeluarkan sedikit. Adanya peningkatan realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah upaya pemerintah dari daerah untuk pembangunan manusia yang lebih baik dan dapat memperoleh dampak positif dengan adanya indeks pembangunan manusia. Berikut adalah jumlah anggaran yang menunjukkan penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Tabel 1.6 Realisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	1.834.749.640	1.834.749.640	1.850.514.381	1.601.774.831	1.845.759.421
Bengkayang	1.114.019.313	1.114.019.313	1.057.558.460	947.456.981	1.250.381.564
Landak	1.377.117.042	1.377.117.041	1.334.650.475	1.328.316.792	2.376.635.044.084
Mempawah	1.032.369.990	1.032.369.990	1.021.982.034	1.039.353.153	922.377
Sanggau	1.652.648.339	1.652.648.339	1.660.753.498	1.578.657.785	1.767.687.618.985
Ketapang	2.375.240.076	2.375.240.076	2.616.938.650	1.910.607.068	2.557.952.058.655
Sintang	1.973.556.932	1.973.556.932	2.004.696.822	1.664.925.269	2.036.118.435.271
Kapuas Hulu	1.837.568.725	1.889.325.756	1.770.674.421	1.496.113.514	73.399.679
Sekadau	877.358.907	877.358.907	871.203.798	841.259.504	921.948.400.895
Melawi	1.162.157.713	1.162.157.713	1.121.179.196	1.047.823.356	1.034.736.581
Kayong Utara	777.160.159	777.160.159	858.169.992	487.890.344	787.375.971.531
Kubu Raya	1.533.365.324	1.533.365.325	1.553.468.400	1.500.873.007	1.681.097.740
Kota Pontianak	1.764.013.423	1.764.013.423	1.573.721.427	1.692.370.110	1.816.643.436.052
Kota Singkawang	920.008.487	920.008.487	886.640.763	863.305.197	983.286
Kalimantan Barat	5.939.753.157	6.332.879.812	6.431.288.413	6.103.624.353	6.294.845.374

Sumber:Kementrian Keuangan (2024)



Tabel 1.6 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah mengalami adanya ketidakstabilan menuju dari tahun ke tahun di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pada tahun 2019, realisasi penerimaan pemerintah yang tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang sebanyak Rp. 2.375.240.076. Sementara realisasi penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak Rp.77.160.159. Demikian

realisasi penerimaan daerah pada tahun 2023 yang tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang sebanyak Rp. 2.557.952.058.655. Sedangkan realisasi penerimaan pemerintah yang terendah sebanyak Rp. 922.377 terdapat di Kabupaten Mempawah. Penerimaan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan penerimaan yang optimal, pemerintah daerah memiliki sumber daya untuk mendanai berbagai layanan publik yang merupakan komponen utama dalam pengukuran IPM. Misalnya, dana yang terkumpul dari pajak, retribusi, dan sumber-sumber lain memungkinkan peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan serta pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dengan adanya penerimaan daerah yang cukup, pemerintah dapat mengimplementasikan program-program sosial yang memberi dukungan untuk kesejahteraan. Dengan demikian, pengelolaan penerimaan daerah yang efektif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan IPM dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan dari masalah yang telah dipaparkan di atas maka terdapat lima pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat?
5. Bagaimana pengaruh penerimaan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Daerah terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat.